**DAFTAR BUKTI TERTULIS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PRAPERADILAN DI PN-JAKARTA PUSAT A.N. PEMOHON JOHANNIS VITYN, LIAUW FIE BOEN, JUSTIANI, HENDRA ANDREAS, TUAN HAJI BOYAMIN SAIMAN.**

|  |  |
| --- | --- |
| Bukti | NAMA BARANG BUKTI |
| P-1. | **UU No. 20/2011.**   1. Pasal 56, mengatur tentang Pengelola dan Pengelolaan Rusun.   Ayat (1) mengatur Kewenangan Pengelola yaitu sebagai Operator atas barang –barang milik bersama warga Rusun, kebersihan dan perawatan Tanah bersama, Bagian bersama dan Benda bersama.   1. Pasal. 74. tentang pembentukan dan keanggotaan PPPSRS, dikaitkan dengan Pasal 75 Ayat (3) tentang kewajiban PPPSRS dan Pasal 77, maka:   - Pemegang kedaulatan dalam PPSRS adalah Pemilik/Penghuni Rusun.  - Rapat UMUM Pemilik/Penghuni Rusun sebagai forum tertinggi dalam  Kaitan Kepenghunian/Berserikat norma hak suara = 1 nama = suara, sedang dalam hal kepemilikan hak suara berdasarkan NPP.  - Pengurus PPPSRS adalah PEMILIK yang Penghuni (Tinggal di Rusun).  - Surat Kuasa dari Pemilik hanya berlaku bagi Penghuni (Penyewa).  c. Pasal 74, 75 (3) dan (4) tentang kewenangan PPPSRS dalam membentuk atau  menunjuk Pengelola dikaitkan dengan Pasal 56 tentang Pengelolaan Rusun,  Pasal 57 (2) Hak pengelola untuk mendapat biaya, maka:   * PPPSRS adalah lex spesialis, 1 kawasan Rusun hanya ada 1 PPPSRS. * Kewenangan untuk menarik PUNGUTAN dari warga adalah PPPSRS. * PPPSRS bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya kepada Pemilik/Penghuni. * Pengelola adalah sub ordinate dari PPPSRS.   d. Pasal 47, mengatur tentang HAK Kempilikan Sarusun terdiri atas: Hak  Kepemilikan Perorangan Yaitu Ruang tempat tinggal yang dibatasi tembok dan pintu, dan Hak Kepemilikan Bersama terdiri dari tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. |
| P-2. | 1. **SK GUB DKI Nomer: 1029 Tahun: 2000,** tentang Pengesahan PPRSC GCM sebagai badan hukum yang didalamnya terdapat AD/ART PPRSC GCM. 2. **AD PPRSC GCM.** 3. **ART PPRSC GCM.** |
| P-3. | **KEP GUB DKI Nomer: 1204 Tahun 1997** **Tentang PERTELAAN RUSUN GCM.**  Dalam pertelaan dijelaskan dan disertai lampiran daftar semua barang yang ada di Rusun GCM, baik yang masuk dalam kategori Milik Perseorangan, maupun semua barang yang masuk milik Bersama. |
| P-4. | **Brosur Pemasaran yang Diterbitkan oleh PT. Duta Pertiwi Selaku Pengembang pada Januari 1997** |
| P-5. | **NASKAH SERAH TERIMA HAK KEPEMILIKAN BERSAMA DAN PENGELOLAAN RUSUN DARI PT. DUTA PERTIWI SELAKU PENGEMBANG KEPADA PPRSC GCM TERTANGGAL 22 DESEMBER 1999.**  Bahwa secara administratif PT. Duta Pertiwi sesuai dengan UU Rusun 16/1985 sesungguhnya telah menyerahkan kepemilikan Hak Bersama kepada PPRSC GCM.  **Dalam prakteknya untuk urusan kepemilikan:**   * Sertipikat HGB No.210/Sumur Batu hingga saat ini belum dibalik nama. * Nama ID Pelanggan Listrik dan Air baru dibalik nama oleh Kepengurusan PPRSC GCM Hasil RULB. * Menyewakan asset Hak Bersama tanpa persetujuan warga selaku pemilik yang sah. |
| P-6. | 1. **AKTA NOTARIS STEPHANY MARIA LILIANTI NOMER: 60 Tahun 2013.** 2. **AKTA NOTARIS STEPHANY MARIA LILIANTI NOMER: 61 Tahun 2013.** 3. **AKTA NOTARIS STEPHANY MARIA LILIANTI NOMER: 62 Tahun 2013.** 4. **AKTA NOTARIS STEPHANY MARIA LILIANTI NOMER: 63 Tahun 2013.**   Berisi tentang Hasil RULB Tanggal 20 September 2013.  Akta Nomer 63 Tahun 2013 tentang Kepengurusan PPRSC GCM Pimpinan Tonny Soenanto. |
| P-7. | **Legalitas dan Legitimasi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS GCM)**  Terdiri dari:   1. Surat Kadis Perumahan & Gedung Pemprov DKI No. 492/-1.796.55 2. Surat Men PUPR RI No. HK 02.01-Mn/438 3. Surat Ketua Ombudsman RI No. 0274/SRT/0211.2015/BS.19/Tim.V/III/2015 4. Kep GUB DKI No. 1029/2000 5. AD/ART PPPSRS GCM 6. Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon No. 14 7. Surat Dinas Perumahan No. 1405/-1786.55 dan No. 1688/-1.796.71 8. Surat Dirjen Pajak Nomer S-139/PJ/2013 9. Kesepakatan Tripartit 10. Surat Dinas Perumahan No. 3345/-1.796.71 11. Akta Notaris Stephany Maria Lilianti No. 60,61,62, dan 63. 12. Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat 13. Hasil Laporan Singkat Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III & V DPR RI, Menpera RI, Ka BPN, Gub DKI, PLN,dll. 14. NPWP PPPSRS GCM 15. Balik Nama ID Pelanggan Listrik PLN 16. Balik Nama Pelanggan Air PAM JAYA 17. Dukungan Tertulis 600 Pemilik/Penghuni Rusun GCM |
| P-8. | **Fotokopi Daftar Kepemilikan Unit Sarusun Kawasan GCM dari BPN**  Dalam rangka persiapan RUTA, tepatnya pada bulan awal Juni 2015, Pengurus PPRS GCM mendapat kiriman data kepemilikan seluruh Sarusun GCM (Pemegang Hak Sarusun GCM) dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat lewat Dinas Perumahanan via Surat Elektronik ( E-Mail).  Dari Daftar Kepemilikan tersebut diketahui ada 27 Ruang Hak Bersama yang pada tahun 1997 disertipikatkan oleh PT. Duta Pertiwi menjadi a.n. diri nya (PT. Duta Pertiwi). |
| P-9. | **Putusan Pengadilan Perkara Nomer: 510/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst**  Dengan Putusan Pengadilan berupa “GUGATAN TIDAK DITERIMA, karena Gugatan Kabur”, maka Keberadaan PPRSC GCM Hasil RULB Pimpinan Tonny Soenanto sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Stephany Maria Lilianti SH, secara hukum SAH dan Mengikat. |
| P-10. | **Putusan Pengadilan Perkara Nomer: 49/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst**  Ex. Pengurus PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar yang diberhentikan dalam RULB kembali mengajukan Gugatan baru. Namun demikian oleh Pengadilan PN. Jakarta Pusat kembali lagi diputus “GUGATAN TIDAK DITERIMA”.  Artinya Keabsahan Hasil RULB yang dituangkan dalam Akta Notaris Stephany Maria Lilianti salah satunya adalah Tentang Kepengurusan PPRSC GCM Hasil RULB Pimpinan Tonny Soenanto menjadi ABSOLUT SAH SECARA HUKUM. |
| P-11. | **Bukti Pencabutan Permohonan Banding Perkara Perdata No. 510/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST** |
| P-12.  P-13.  P-14. | **BUKTI BAHWA PENGURUS PPRS GCM PIMPINAN SDR. AGUS ISKANDAR ADALAH BONEKA PENGELOLA.**   1. **SURAT EX PENGURUS PPRS GCM TELAH DIBERHENTIKAN OLEH WARGA DALAM RULB, DENGAN NOMER: 049/PP-GCM/X/2013 TANGGAL 11-Oktober - 2013.**   Yang isinya meminta kepada PLN untuk mengembalikan nama ID Pelanggan Listrik yang baru saja dibalik nama oleh Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB, kembali menjadi a.n. PT. Duta Pertiwi lagi.   1. **Surat dengan maksud yang sama dibuat oleh PT. Duta Pertiwi ditujukan kepada PLN, dengan Nomer : 078/PM-GCM/X/2013 Tanggal 24 – 10 - 2013.** 2. **SP-3 dari Bareskrim terhadap LP Duta Pertiwi dengan Terlapor Manajer PLN, terkait dengan balik nama.** |
| P-15. | **Surat PPRSC Nomer 21/PPRSC-GCM/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.** |
| P-16.  P-17.  P-18. | **SURAT-SURAT YANG TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG DKI.**   1. **Surat Kadis Perumahan DKI Nomor: 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015, Perihal : Pemberitahuan,**   Tapi isinya menunjuk PT. Duta Pertiwi Tbk sebagai Pengelola Rusun GCM. Dan Membuat aturan baru warga membayar IPL nya ke Rekening PT. Duta Pertiwi Tbk. Materi ini jelas melanggar ketentuan UU Rusun, maka Kadis Perumahan DKI diingatkan oleh Komisi Ombudsman RI, dan juga oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI, sebagaimana tertuang dalam butir 2 dan 3 dibawah.   1. **Surat Komisi Ombudsman RI Nomor: 0274/SRT/0211.2015/BS.19/ Tim.V/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015**,   Yang berisi arahan untuk Kadis Perumahan DKI segera merevisi surat Kadis Perumahan DKI No. 492/-1.796.55.   1. **Surat Menteri PU PR RI kepada GUB DKI dengan Nomer: HK 02.01- Mn/438. Tanggal 3 Juni 2015**.   Yang intinya meminta agar GUB DKI memerintahkan Kadis Perumahan DKI segera merevisi surat yang dimaksudkan diatas. |
| P-19. | **Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon Nomer 14/2013.**  Yang menetapkan bahwa masa bhakti Kepengurusan PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar hanya sampai tanggal 5 Febrruari 2015. |
| P-20. | **Analisa Hukum dan Dampak Sosial Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI No. 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015 dan Nota Dinas No. 2346/-1.796.55 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikutip dalam Surat Sekjen Kemen PUPR RI No. HK.02.01-Sj/452 Tanggal 10 Agustus 2015.**  Membuktikan bahwa kedua surat tersebut sebagai tameng PMH (Perbuatan Melawan Hukum) PT. Duta Pertiwi Tbk dan bertentangan dengan ketentuan UU No. 20/2011 dan AD/ART PPRSC GCM. Dibuat oleh KIBAR, MAKI, KAPPRI, Kantor Pengacara Boyamin Saiman & Partners, Law Office of Harjadi Jahja & Partners, Kantor Konsultan Hukum Bob Hasan & Partners. |
| P-21. | | **Surat-Surat Pengurus PPRSC GCM Meminta Kepada Kadis Perumahan DKI untuk Mencabut No. 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015:**   1. **Surat PPRSC Nomer 22/PPRSC-GCM/II/2015 tanggal 16 Februari 2015**   Perihal: Mohon Pembatalan/Peninjauan Ulang Surat Kadis Perumahan No. 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015, Perihal: Pemberitahuan.   1. **Surat PPRSC Nomer 40/PPRSC-GCM/IV/2015 tanggal 30 April 2015**   Hal : Permintaan:   1. Penindakan atas Pemutusan Listrik Terhadap Penghuni Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas (GCM), 2. Pencabutan Surat Kadis No. 492/-1.796.55 tanggal 11 Februari 2015 *(”Surat 492”)* dan 3. Percepatan Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA). 4. **Surat PPRSC Nomer 56/PPRSC-GCM/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015**   Tentang Permohonan Pencabutan Surat No. 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015 dan Pengurus PPRSC GCM akan melakukan Rapat Umum Tahunan PPPSRS Graha Cempaka Mas (GCM) sendiri.   1. **Surat PPRSC Nomer 108/PPRSC-GCM/IX/2015 tanggal 28 September 2015**   Perihal: Permohonan PEMBATALAN/PENCABUTAN Surat Kadis Perumahan No. 492/-1.796.55 Tanggal 11 Februari 2015, Perihal: Pemberitahuan. |
| P-22. | **Surat Sekjen Kemenpupera RI No. HK.02.01-Sj/452 tanggal 10 Agustus 2015**  Perihal: Laporan Hasil Tindak Lanjut Penanganan Permasalahan Kelembagaan dan Pengelolaan Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas yang didalamnya terdapat Nota Dinas Nomer 2346/-1.796.55 tanggal 25 Juni 2015. |
| P-23. | **Surat Komisi Ombudsman Nomer 0324/SRT/0211.2015/BS-19/TimV./IV/2015 TANGGAL 20 April 2015**  Surat ini oleh Kadis Perumahan DKI dalam Nota Dinas Nomer 2346/-1.796.55 tanggal 25 Juni 2015 disebut untuk meralat surat Komisi Ombudsman RI pada bukti P-13, padahal sama sekali tidak. Perihal dukungan untuk RUTA dari awal memang semua pihak akan mendukung RUTA. |
| P-24. | 1. **Fotokopi Akta Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah No. 14 Tahun 2015.** 2. **Fotokopi Akta Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah No. 15 Tahun 2015.** 3. **Fotokopi Akta Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah No. 22 Tahun 2015.**   Pada tanggal 26 – Juli - 2015 Pengurus menyelenggarakan RUTA, dengan hasil tertuang dalam 3 Akta Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah Nomer: 14, 15 dan 22 Tahun 2015.  Salah satu hasil RUTA, bahwa Pengurus ditugasi untuk melaporkan semua kejahatan PT. Duta Pertiwi kepada yang berwajib. |
| P-25. | **Putusan Pengadilan Perkara No. 08/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst** |
| P-26. | **Putusan Pengadilan Perkara No. 09/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst.**  Dalam Pertimbangan Hakim menegaskan bahwa Panel Listrik dan Gembok adalah masuk kategori MILIK BERSAMA, hal ini memperkuat ketentuan Pasal 46 UU NO.20/2011 dan Kep Gub DKI Nomer 1204 Thn 1997 tentang Pertelaan Rusun GCM. |
| P-27. | **Foto Pendzaliman PT. Duta Pertiwi berupa Pengerahan Ratusan Preman dan Pemadaman Listrik disertai “Vandalisme” yang justru dikawal oleh Petugas Polri.** |
| P-28. | **Nota Kesepakatan Di Polres Tanggal 6 - Februari- 2014.**   1. Terlapor selaku pengelola telah melebihi kewenangan yang diatur pasal 56 UU NO.20/2011. karena pengurus PPRSC GCM versi pengelola tak lebih sebagai boneka pengelola. 2. Nota ini membuktikan bahwa upaya damai sudah ditempuh warga, namun kemudian dilanggar sepihak oleh pelapor (PT. Duta Pertiwi Tbk). |
| P-29. | **Daftar 23 LP warga GCM yang tidak ada kepastian Proses Hukum.**  LP warga di Jajaran Polda Metro Jaya sejak Januari 2014 belum ada 1 pun yang di proses sebagaimana mestinya, sementara LP oarng-orang PT. Duta Pertwi yang baru pun di proses dengan cepatnya. |
| P-30. | **Surat-Surat PPRSC yang memberhentikan PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola**   1. **Surat PPRSC No. 61/PPRSC-GCM/VI/2015 tertanggal 8 Juni 2015 Perihal: Penyerahan Pengelolaan Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas (GCM) Secara Baik-Baik dan Damai.** 2. **Surat PPRSC No. 100/PPRSC-GCM/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 Perihal: Peringatan Terakhir untuk Menyerahkan Pengelolaan Rusun Graha Cempaka Mas.** 3. **Surat PPRSC No. 132/PPRSC/GCM/XII/2015 tertanggal 9 Desember 2015 Perihal: Serah Terima Damai Pengelolaan Gedung Graha Cempaka Mas (GCM)** |
| P-31. | **Sertipikat Hak Milik Pemohon I : Johannis Vityn.**  Bukti bahwa Pemohon II adalah Pemilik Barang Sebesar NPP atas Kaca Yang dipecahnya. |
| P-32. | **Sertipikat Hak Milik Pemohon II : Liauw Fie Boen.**  Bukti bahwa Pemohon I adalah Pemilik Barang Sebesar NPP atas Kaca Yang dipecahnya. |
| P-33. | 1. **Akta Jual Beli Sdr Johannis Vityn.** 2. **Akta Jual Beli Sdr Liauw Fie Boen.**   Di dalam AJB tersebut terdapat benda bersama, bagian bersama, tanah bersama. |
| P-34. | | **Foto-Foto Tabung APAR**  Membuktikan bahwa pihak Security PT. Duta Pertiwi yang menyiapkan tabung APAR untuk menyerang warga. |
| P-35. | **Bukti Bayar PBB 5 Orang Pemilik Sarusun GCM**  Bukti bayar PBB ini termasuk Pajak Bumi, Bangunan, Bumi Bersama, dan Bangunan Bersama. |
| P-36. | **Surat PPRSC GCM kepada PT. Duta Pertiwi Tbk Nomer 95/PPRSC-GCM/I/2014 tanggal 27 Januari 2014**  Perihal: Pemberitahuan Putusan Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) 2014 Dimana Didalamnya Terdapat Putusan Memberhentikan Badan Pengelola yaitu PT. Duta Pertiwi Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) AD jo Pasal 7 ayat 3 ART. |
| P-37. | **Laporan Polisi Saurip Kadi Melaporkan Ika Lestari Aji Nomer LP/1354/XI/2015/Bareskrim tanggal 30 November 2015**  LP Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHPidana yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 20/2011 dan AD/ART PPRSC GCM. |
| P-38. | **Laporan Polisi Justiani Melaporkan Hokli Lingga Nomer LP/1361/XII/2015/Bareskrim tanggal 1 Desember 2015**  LP Dugaan Tindak Pidana memasuki Pekarangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP. |
| P-39. | **Laporan Polisi Justiani Melaporkan AKP SUYUD (Mantan Kapolsek Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat) Nomer STPL/83/XII/2015/Subbagyanduan tanggal 21 Desember 2015**  AKP Suyud memediasi kejadian tanggal 1 Juni 2015 lalu menipu warga dengan memasang Police Line yang pada tanggal 4 Juni 2015 Police Line tersebut dibuka tanpa melibatkan warga dan TKP diserahkan kembali ke PT Duta Pertiwi Tbk. |
| P-40. | **Laporan Polisi Justiani Melaporkan Agus Iskandar, Lily Tiro, Hery Wijaya, Ayu Dharmawati, dkk Nomer LP/5403/XII/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 16 Desember 2015**  LP Perkara Pemalsuan Surat dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Fitnah |
| P-41. | **Bukti dalam Video (Dalam Flashdisk) dimana tampak HOKLI LINGGA mempimpin gerombolan preman melakukan pengeroyokan dan pengrusakan kantor P3SRS Kondominium Menara kelapa Gading** |
| P-42. | **Laporan Polisi Edo Amando Malonda Melaporkan Hokli Lingga Nomer LP/1333/K/XI/2015/PMJ/RESJU**  LP tentang Pengeroyokan yang terjadi di Kondominium Menara Kelapa Gading Tower C Kec. Kelapa Gading-Jakut dimana Hokli Lingga mengerahkan preman untuk merusak kantor PPRS Kondominium Menara Kelapa Gading dengan memecahkan kaca-kaca ruangan. Hokli Lingga adalah orang yang mengaku sebagai pengacara PT Duta Pertiwi yang bertahan di ruang PPRS lantai 5 Tower C1 Apartemen Graha Cempaka Mas saat mediasi tanggal 1 Juni 2015. |
| P-43. | **Laporan Polisi Husain Hamid Naru Melaporkan Hokli Lingga Nomer LP/1335/K/XI/2015/PMJ/RESJU**  LP tentang Pengeroyokan yang terjadi di Kondominium Menara Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading-Jakut dimana Hokli Lingga mengerahkan preman untuk merusak kantor PPRS Kondominium Menara Kelapa Gading dengan memecahkan kaca-kaca ruangan. Hokli Lingga adalah orang yang mengaku sebagai pengacara PT Duta Pertiwi yang bertahan di ruang PPRS lantai 5 Tower C1 Apartemen Graha Cempaka Mas saat mediasi tanggal 1 Juni 2015. |
| P-44. | **Laporan Polisi Justiani Melaporkan PT. Duta Pertiwi Tbk Nomer 942/K/VII/15/RESTRO JAKPUS Tanggal 1 Juli 2015**  Berdasarkan Hasil RUTA tersebut dibikin LP tersebut diatas, yang isinya melaporkan PT. Duta Pertiwi dengan tuduhan Pemalsuan, Penipuan. Dan Penggelapan Hak atas 27 Ruang yang disertipikatkan a.n. dirinya (PT. Duta Pertiwi) dan juga tuduhan Penipuan dan Penggelapan atas Tanah Bersama dengan alas hak berupa Sertipikat HGB Nomer:210/ Sumur Batu yang ternyata sejak 1997 belum dibalik nama kan kepada segenap Pembeli yang diwakili oleh PPRSC GCM selaku Wali Amanah, padahal pembayaran, pajak pembelian dan segala kewajiban kepada negara sudah dibayar lunas. |
| P-45. | **Laporan Polisi Maureen Frances Melaporkan PT. Duta Pertiwi Tbk Nomer 941/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS Tanggal 1 Juli 2015**  Melaporkan Tentang Penggelapan + Penipuan karena menyewakan Hak Bersama tanpa ijin pemiliknya yang sah yaitu Tanah Bersama untuk Jasa Parkir, Iklan dan Kantin dan uang sewanya digelapkan. |
| P-46. | **Laporan Polisi Bong Jan Nie Melaporkan PT. Duta Pertiwi Tbk (Direktur Lie Janie Harjanto) Nomer 940/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS Tanggal 1 Juli 2015**  Melaporkan Tentang Tindak Pidana penipuan dan penggelapan karena menyewakan ATAP BANGUNAN sebagai Hak bersama tanpa ijin dari Pemiliknya yang sah untuk mendirikan Antene dan BTS dan uang sewanya digelapkan. |
| P-47. | **Laporan Suresh Bhagwandas Bhavnani Melaporkan Lie Jannie Herjanto (Dirut PT. Duta Pertiwi Tbk, Christine Natasha Tanjungan (Kuasa Direksi PT. Duta Pertiwi Tbk), Budhi Basharudin (Property Manajer) Nomer 939/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS Tanggal 1 Juli 2015**  Melaporkan Tentang Penggelapan + Penipuan |
| P-48. | **Laporan Polisi Justiani Melaporkan Direktur PT. Duta Pertiwi Tbk, Ika Lestari Aji, Basuki Cahaya P Nomer 943/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS Tanggal 1 Juli 2015**  Melaporkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang karena menerbitkan Surat Nomer: 492/-1.796.55. yang isinya menunjuk PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola dan membikin aturan baru IPL hanya dibayarkan ke Rekening Pengelola (PT. Duta Pertiwi. Surat ini bertentangan dengan Ketentuan UU No.20/2011. Dan untuk itu Komisi Ombudsman RI dan Menteri PUPR menerbitkan surat sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P-13 dan P-14  Kemudian Kadis Perumahan DKI menerbitkan Nota Dinas Nomer: 2346/-1.796.55 tanggal 25 Juni 2015 yang isinya bahwa Komisi Ombudsman telah menerbitkan surat Nomer 0324/SRT/0211.2015/BS-19/TimV./IV/2015 Tanggal 20 April 2015 untuk meralat Surat yang dimaksud dalam P-13 padahal isinya sama sekali tidak meralat surat nya terdahulu |
| P-49. | | **Laporan Polisi Johannis Vityn Melaporkan Buddy Basharuddin, Cs Nomer 1630/K/XI/2015/RESTRO JAKPUS Tanggal 30 November 2015**  Melaporkan Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan |
| P-50. | | **Surat Panggilan dari Polres Metro Jakarta Pusat Nomer S.Pgl/5142/S.14/X/2015/Res JP tanggal 2 Oktober 2015 untuk Yulianti sebagai Saksi atas nama Pelapor Buddy Basharuddin, ST.** |
| P-51. | | **Surat PPRSC kepada Kabareskrim Mabes Polri Nomer 107/PPRSC-GCM/IX/2015 tanggal 28 September 2015**  Perihal: Permohonan Untuk Menghentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap  Warga Rusun Graha Cempaka Mas (GCM). |
| P-52. | | **Surat PPRSC kepada Kapolda Metro Jaya Nomer 127/PPRSC-GCM/XII/2015 tanggal 5 Desember 2015**  Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Stop Kriminalisasi 40 Warga Pemilik GCM Tidak Bersalah oleh Aparat Polres Jakpus Binaan PT Duta Pertiwi Tbk untuk menjadi Tameng Kejahatan Bisnis Ilegalnya di Pasar Modal Dalam dan Luar Negeri yang Akan Menghancurkan Indonesia di Tingkat Global. |
| P-53. | | **Surat PPRSC kepada Pimpinan KOMNAS HAM RI Nomer 147/PPRSC-GCM/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015**  Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Bantuan untuk Stop Kriminalisasi 38 Warga Pemilik GCM Tidak Bersalah oleh Aparat Polres Jakpus Binaan PT Duta Pertiwi Tbk untuk Menjadi Tameng Kejahatan Bisnis Illegalnya di Pasar Modal Dalam dan Luar Negeri yang akan Menghancurkan Indonesia Di Tingkat Global, dan permintaan Gelar Kasus Pelanggaran HAM. |
| P-54. | | **Surat PPRSC kepada Pimpinan KOMPOLNAS Nomer 149/PPRSC-GCM/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015**  Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Bantuan untuk Stop Kriminalisasi 38 Warga Pemilik GCM Tidak Bersalah oleh Aparat Polres Jakpus Binaan PT Duta Pertiwi Tbk untuk Menjadi Tameng Kejahatan Bisnis Illegalnya di Pasar Modal Dalam dan Luar Negeri yang akan Menghancurkan Indonesia Di Tingkat Global, dan permintaan Gelar Perkara. |
| P-55. | | **Surat PPRSC kepada Kapolda Metro Jaya Nomer 150/PPRSC-GCM/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015**  **Perihal:** Mohon Puluhan LP Warga Graha Cempaka Mas (GCM) melaporkan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) PT. Duta Pertiwi Tbk untuk SEGERA ditindaklanjuti sesuai Putusan Pengadilan (Selama ini di “PETI ES” kan), dan permintaan Gelar Perkara. |
| P-56. | | **Surat PPRSC kepada KOMNAS HAM Nomer 3/PPRSC-GCM/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.**  Perihal: Permohonan Perlindungan HAM dan Audiensi |
| P-57. | | **Surat PPRSC kepada Pimpinan DPR RI Cq Bapak Fadli Zon Nomer 4/PPRSC-GCM/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.**  Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Audiensi |
| P-58. | | **Surat PPRSC kepada Ketua Komisi III DPR RI Nomer 5/PPRSC-GCM/I/2016 tanggal 13 Januari 2016**  Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Audiensi |
| P-59. | | **Surat PPRSC kepada Ketua KOMPOLNAS RI Nomer 6/PPRSC-GCM/I/2016 tanggal 13 Januari 2016**  Perihal: Permohonan Audiensi |
| P-60. | | **Surat PPRSC kepada Mayjen TNI Andogo Wiradi, Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis Nomer 7/PPRSC-GCM/I/2016 Tanggal 13 Januari 2016**  Perihal: Permohonan Keamanan Negara, Perlindungan HAM, Perlindungan Hukum, dan Audiensi. |
| P-61. | | **Surat PPRSC Kepada Kementerian Hukum dan HAM Nomer 8/PPRSC-GCM/I/2016 tanggal 13 Januari 2016**  Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Audiensi |
| P-62. | | **Fotokopi Jawaban Termohon dan Putusan Pra Peradilan Perkara Nomer 01/Pid-prap/2016/PN.JKT.PST** |
| P-63. | | **Permohonan PTUN:**   1. **Surat PPRSC GCM Nomer 67/PPRSC-GCM/VI/2015 Tanggal 12 Juni 2015**   Tindak lanjut Pengurus PPRSC GCM setelah mengetahui adanya 27 SHM pada Hak Bersama yang dimaksud dalam P-33, maka segera menerbitkan Surat tersebut diatas yang di Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Ka BPN yang isinya mempersoalkan 27 SHM tersebut dan meminta untuk membatalkannya. Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa manakala Pihak BPN tidak segera memperbaiki kesalahan tsb, kami akan menempuh jalur hukum   1. **Surat PPRSC GCM Nomer 115/PPRSC-GCM/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015**   Tentang Permohonan Ulang Untuk Balik Nama Pemegang Hak Atas Tanah Bersama Rusun Graha Cempaka Mas dan 27 Ruang Fasum/Fasos Graha Cempaka Mas   1. **Surat PPRSC GCM Nomer 146/PPRSC-GCM/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015**   Perihal: Permohonan Balik Nama SHGB No.210 Kawasan GCM Kelurahan Sumur Batu dan 27 Unit Fasum Fasos Milik Warga GCM yang keduanya masih dikuasai PT Duta Pertiwi Tbk, dan Pemberitahuan KEABSAHAN Pengurus PPRSC GCM serta Putusan Pengadilan, LP (Laporan Polisi) oleh Warga atas Kejahatan PT Duta Pertiwi Tbk dan Antek-anteknya |
| P-64. | | **Permohonan PTUN:**   1. **Surat KAPPRI Nomer: 23/SK/KAPPRI/IV/2015 Tanggal 17 April 2015**   Tentang Mohon Segera Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat Untuk Segera Membalik Namakan Sertipikat Induk Kawasan GCM SHGB Nomer 210/Kelurahan Sumurbatu dan 27 SHM SRS.   1. **Surat KAPPRI Nomer 99/SK/KAPPRI/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015**   Tentang Mohon Segera Memerintahkan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat Untuk Segera Membalik Namakan Sertipikat Induk Kawasan GCM SHGB Nomer 210/Kelurahan Sumurbatu dan 27 SHM Fasum/Fasos GCM |
| P-65. | | **Fotokopi Permohonan PTUN Perkara Nomor 2/P/FP/2016/PTUN-JKT tertanggal 29 Januari 2016** |
| P-66. | | **Fotokopi Bukti Tanda Terima Berkas Permohonan Perma No. 5 Tahun 2015 A.N. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC GCM), dkk ke PTUN.**  Bukti Pendaftaran Berkas Permohonan Pembatalan 27 Sertipikat SHM SRS pada Bagian Bersama Rusun Graha Cempaka Mas dan Balik Nama Sertipikat SHGB Nomer 210/Sumur Batu. |
| P-67 | | **Fotokopi Permohonan PTUN Perkara Nomor 7/P/FP/2016/PTUN-JKT tertanggal 29 Januari 2016** |
| P-68 | | **Contoh Sertipikat untuk Kawasan yang SHGB nya sudah dibalik nama menjadi atas nama P3SRS yaitu Kawasan Rusun OASIS MITRA SARANA Jakarta Pusat.** |
| P-69. | | **Putusan Gugatan Pengadilan TUN Nomer 182/G/2012/PTUN-JKT Tahun 2013 atas kasus yang sejenis dengan permohonan ini.**  Dengan Putusan Pengadilan TUN DKI yang mengabulkan gugatan untuk Sertipikat HGB atas tanah bersama Rusun (Apartemen) Slipi dibalik namakan menjadi a.n. PPPSRS Slipi selaku wali amanah segenap Pemilik Sarusun Slipi |
| P-70. | | **Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10447 Rusun Taman Hijau** |
| P-71. | | 1. **Fotokopi Akta Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah No. 19 Tahun 2016.** 2. **Fotokopi Akta Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah No. 25 Tahun 2016.**   Pada tanggal 20 – Februari -2016 Pengurus menyelenggarakan RUTA, dengan hasil tertuang dalam 2 Akta Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah Nomer: 19 dan 25 Tahun 2016.  Salah satu hasil RUTA, bahwa Pengurus ditugasi untuk melaporkan semua kejahatan PT. Duta Pertiwi kepada yang berwajib. |
| P-72. | | **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. 1/Pid-Prap/2016/PN.JKT.SEL**  Atas LP Nomer LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 yang dinyatakan tidak SAH, inti putusan ini bahwa PMH (Perbuatan Melawan Hukum) PT. Duta Pertiwi wajib dilanjutkan penyidikannya sampai ada TERSANGKA. |
| P-73 | | **Surat Panggilan No. S.Pgl/1189/IV/2016/Dittipidum tertanggal 18 April 2016**  Surat Panggilan dari Bareskrim kepada Saurip Kadi untuk diperiksa kembali atas LP Nomer LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 yang menang di PraPeradilan PN Jaksel. |
| P-74 | | **Surat SP2HP Nomor B/272/IV/2016/Dittipidum tanggal 18 April 2016**  Surat SP2HP yang menyatakan LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 kembali dibuka dan dilanjutkan pemeriksaan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. 1/Pid-Prap/2016/PN.JKT.SEL. |
| P-75 | | **UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.** |
| P-76 | | **Surat Dirjen Pajak Nomer S-634/PJ.04/2016 tanggal 17 Maret 2016**  Bahwa Permohonan Restitusi PPN 10% Warga GCM akan diteliti lebih lanjut. |
| P-77 | | **Audit Independen Kerugian Warga Graha Cempaka Mas Akibat PMH PT. Duta Pertiwi Tbk.** |
| P-78 | | **Surat PPRSC No. 60/PPRSC-GCM/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Perihal : Peringatan 1 ke BPN** |
| P-79 | | **22 Surat Peringatan Ketiga ke BTS di GCM** |
| P-80 | | **Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 260/18-31.600/II/2016 Tanggal 2 Februari 2016.**  Surat ini ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat menjelaskan bahwa agar dilakukan penelitian dan penanganan terhadap permasalahan di Rusun GCM. |
| P-81 | | **Kajian Hukum dan Dampak Sosial Ignorance & Negligance (Kesengajaan Pembiaran & Kelalaian) KanPtor Pertanahan Wilayah Administrasi Jakarta Pusat Atas PMH (Perbuatan Melawan Hukum) Oleh PT Duta Pertiwi Tbk Sehingga Merugikan Ribuan Warga Pemilik Asset Dan Pemegang Saham Publik Serta Merusak & Menurunkan Kredibelitas Nilai Investasi Indonesia Di Mata Dunia** |
| P-82 | | **Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 899/7-31.71-300/IV/2015 Tanggal 12 April 2016.** |
| P-83. | | **Surat dari Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1011/7-31.71-300/IV/2016 Tanggal 25 April 2016.**  Perihal: Laporan Permohonan Ulang Untuk Balik Nama Pemegang Hak Atas Tanah Bersama Rusun Graha Cempaka Mas dan 27 Ruang Fasum/Fasos Graha Cempaka Mas. |
| P-84. | | **Surat PPRSC No. 70/PPRSC-GCM/V/2016 Tanggal 13 Mei 2016**  Perihal: Kewajiban BPN Untuk Membalik Namakan Atau Membatalkan 27 SHM SRS Pada Bagian Bersama Dalam Rumah Susun Graha Cempaka Mas (Rusun GCM) |
| P-85. | | **Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia No. B-773/Kemensetneg/D-2/DM.05/02/2016 Tanggal 17 Februari 2016**  Perihal: Pengaduan Masyarakat |

Jakarta, 26 April 2016.